

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UU Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap daerah memiliki kewenangan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Dari peraturan tersebut segala kepentingan dan urusan di atur oleh masing-masing daerah termasuk mengelola keuangan daerah. Ketika berbicara tentang "pengelolaan keuangan daerah", yang dimaksudkan adalah bahwa daerah bertanggung jawab atas segala hal mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengendalian keuangan.

APBD, rencana keuangan tahunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan daerah, harus disertakan dalam setiap pembahasan keuangan daerah. APBD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tunduk pada persyaratan bahwa mereka menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat umum yang merinci bagaimana mereka akan menggunakan dana APBD. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan kepada mereka yang membutuhkan tentang situasi keuangan pemerintah daerah dan semua transaksi yang telah terjadi. Laporan keuangan pemerintah dimaksudkan untuk mendidik masyarakat umum tentang situasi keuangan entitas pelapor, pencapaian anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah salah satu dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Disajikan dalam laporan ini adalah perbandingan sumber daya ekonomi yang diharapkan akan diterima dan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk tujuan pendanaan kegiatan pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran yang mengkaji bagaimana sumber daya ekonomi yang pemerintah pusat atau daerah kelola didistribusikan, dibelanjakan, dan dimanfaatkan selama periode pelaporan tertentu, dapat digunakan untuk menetapkan kepatuhan APBD. Sasaran anggaran dan apa yang sebenarnya dicapai selama periode pelaporan dibandingkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi suatu anggaran cenderung lebih menjadi perhatian publik karena realisasinya dianggap sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan anggaran tersebut berhubungan langsung dengan program dan kegiatan untuk melayani kepentingan masyarakat oleh karena itu, pelaksanaan anggaran belanja pemerintah perlu diukur efektivitas dan efisiensinya.

Pengukuran efektifitas dan efisiensi kinerja dapat dilakukan dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas lembaga keuangan serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara hemat biaya. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya dapat dinilai dengan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkannya. Analisis laporan keuangan ialah teknik analisis yang tersebar luas di perusahaan nirlaba, tetapi relatif jarang di organisasi nirlaba, khususnya lembaga pemerintah daerah. Hal ini karena keterbatasan dan perbedaan sifat dan ruang lingkup penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pengelolaan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). BPKPD merupakan pihak yang pertama dalam menjalankan otonomi daerah dalam mengelola dana APBD dalam mendanai kebutuhan daerah. Penerimaan dan pengeluaran daerah sumber pendanaanya dari APBD.

Rendahnya penyerapan anggaran, baik secara langsung maupun tak langsung, dimana masih terdapat belanja yang belum terealisasi merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam laporan realisasi anggaran untuk penelitian APBD. Kurangnya penyerapan modal yang memadai dapat menyebabkan laju pertumbuhan belanja yang lebih lambat, belanja daerah yang tidak efisien, dan masalah lain dengan kinerja belanja, seperti ketidaksesuaian antara belanja modal dan belanja operasional.

Penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul “ANALISIS REALISASI ANGGARAN DALAM MENILAI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019-2021” berdasarkan uraian yang diberikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Selama penelitian penulis di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas anggaran belanja untuk menyerap sisa dana. Dana yang tersedia masih cukup besar.
2. Penurunan proporsi realisasi belanja tidak stabil, ketidaksesuaian antara belanja langsung dan tidak langsung.

1.3 Pembatasan Masalah

Studi ini mengkaji Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan permasalahan dan identifikasi di atas.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber dari batasan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi pada Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas pada Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan utama dari proyek penelitian ini, berdasarkan masalah yang dibahas di atas:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada laporan realisasi anggaran di BPKPD Kabupaten Buleleng.
2. Untuk melihat tingkat efektivitas kinerja pada laporan realisasi anggaran di BPKPD Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian akan mengarah pada manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pelaporan realisasi anggaran merupakan bidang akuntansi yang peneliti harapkan untuk dipelajari lebih lanjut melalui studi ini.

2. Manfaat Praktis

Riset ini bermanfaat di dunia nyata sehingga peneliti berharap BPKPD Kabupaten Buleleng dapat menggunakannya sebagai referensi dan sumber informasi untuk permasalahan Laporan Realisasi Anggaran.

3. Manfaat Bagi Lembaga

Peneliti mengharapakan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pembuatan program studi Diploma III Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, dan sebagai referensi perpustakaan untuk penelitian-penelitian berhubungan Laporan Realisasi Anggaran.